

**PENGARUH BEBAN KERJA TERHADAP KINERJA  
PERANGKAT NAGARI DALAM PENGELOLAAN  
KEUANGAN NAGARI DI KABUPATEN TANAH DATAR**

**SKRIPSI**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara FIS UNP  
Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



**Oleh:**

**LEDITA ANASTASYA  
TM/NIM: 2015/15042035**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2019**

**PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

**Judul** : Pengaruh Beban Kerja terhadap Kinerja Perangkat  
Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari di  
Kabupaten Tanah Datar

**Nama** : Ledita Anastasya

**Nim/TM** : 15042035/2015

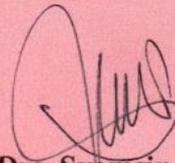
**Program Studi** : Ilmu Administrasi Negara

**Jurusan** : Ilmu Administrasi Negara

**Fakultas** : Ilmu Sosial

Padang, 13 Agustus 2019

Disetujui oleh:  
Pembimbing



**Drs. Syamsir, M.Si Ph.D**  
NIP. 19530401198903 1 003

## PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Padang

Pada Hari Selasa, Tanggal 13 Agustus 2019 Pukul 08.00 s/d 09.00 WIB

### **Pengaruh Beban Kerja terhadap Kinerja Perangkat Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Tanah Datar**

Nama : Ledita Anastasya  
NIM : 15042035  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial

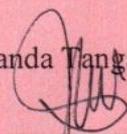
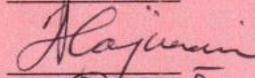
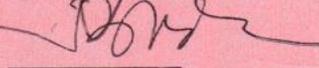
Padang, 13 Agustus 2019

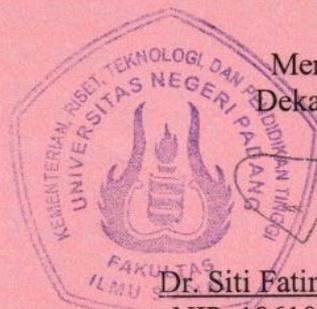
#### Tim Penguji

Nama

1. Ketua : Drs. Syamsir, M.Si., Ph.D.
2. Anggota : Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si.
3. Anggota : Adil Mubarak, S.IP., M.Si.

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 



Mengesahkan  
Dekan FIS UNP

Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum  
NIP. 19610218 198403 2 001

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ledita Anastasya

NIM / TM : 15042035/2015

Tempat/ Tanggal Lahir : Sungai Tarab /13 Juni 1997

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini berjudul “Pengaruh Beban Kerja terhadap Kinerja Perangkat Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Tanah Datar” adalah benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggungjawab saya sebagai penulisnya.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 13 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan,



Ledita Anastasya  
NIM. 15042035/2015

## ABSTRAK

**Ledita Anastasya : Pengaruh Beban Kerja terhadap Kinerja Perangkat Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari Di Kabupaten Tanah Datar**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh beban kerja terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar. Latar belakang penelitian ini dilakukan adalah karena masih rendahnya kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif asosiatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh perangkat nagari dari 75 nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar yang terdiri dari walinagari, sekretaris nagari, bendahara nagari, dan lima kepala urusan nagari. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 248 responden yang ditentukan dengan menggunakan *rumus Slovin* dan pengambilan data dilakukan dengan teknik pengambilan sampel *Multi Stage Random Sampling*. Data dikumpulkan dengan menggunakan pengukuran skala Likert. Analisis data penelitian dilakukan dengan menggunakan uji regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel beban kerja berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan nagari dengan nilai signifikansi 0,017 dan nilai *Adjusted R Square* 0,046. Dengan demikian pengaruh variabel beban kerja terhadap pengelolaan keuangan nagari adalah sebesar 4,6%. Sedangkan sisanya 95,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Sedangkan secara parsial sub variabel tekanan waktu terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari sebesar 3,9%, pengaruh variabel jam kerja terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari sebesar 2,8%, pengaruh kemenduaan peran terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari sebesar 0,9%, pengaruh banyaknya informasi masuk terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari sebesar 4,1%, pengaruh temperatur terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari sebesar 0,1%, pengaruh tindakan berulang terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari sebesar 0% dan pengaruh tanggungjawab terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari sebesar 3,1%.

**Kata kunci :** Beban Kerja, kinerja, pengelolaan keuangan nagari

## KATA PENGANTAR



*Assalammu'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang mana atas berkat limpahan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Beban Kerja terhadap Kinerja Perangkat Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Tanah Datar”**.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih pada:

1. Ibuk Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Aldri Frinaldi S.H, M.Hum., Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Drs. Syamsir., M.Si., Ph.D selaku dosen pembimbing.
4. Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani., M.Si selaku dosen penguji I dan Bapak Adil Mubarak, S. IP., M. Si selaku dosen penguji II.
5. Bapak dan Ibu dosen pengajar beserta staff administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
6. Seluruh staff karyawan dan karyawanati keputakaan dan staff administrasi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

7. Teristimewa kedua orang tua tercinta, Ayahanda Dasril dan Ibunda Rismawati terimakasih yang tak terhingga atas do'a, motivasi, dan ketulusannya mendampingi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Hafif dan Fathir, adik tersayang yang selalu memberikan bantuan dan semangatnya.
9. Seluruh keluarga besar penulis yang penulis cintai dan sayangi.
10. Teman-teman Sepenelitian 2018 yang berjuang mendapatkan gelar Sarjana.
11. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2015, Universitas Negeri Padang.
12. Dan spesial untuk kedua sahabat penulis, Deswinda Eka Putri dan Seprima Yenti yang selalu setia mendampingi dan memberikan semangatnya. ☺

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Selain itu kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Padang, 13 Agustus 2019

Ledita Anastasya

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	9
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Manfaat Penelitian.....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep Beban Kerja.....	13
B. Konsep Kinerja.....	21
C. Pengaruh Beban Kerja Terhadap Kinerja.....	29
D. Perangkat Nagari .....	31
E. Pengelolaan Keuangan Nagari/Desa .....	38
F. Indikator Pengukuran Kinerja Perangkat Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari.....	39
G. Penelitian Terdahulu .....	39

H. Kerangka Konseptual .....	41
I. Hipotesis Penelitian.....	41

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	44
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	44
C. Operasionalisasi Variabel.....	44
D. Populasi dan Sampel Penelitian .....	48
E. Instrumen Penelitian.....	50
F. Jenis, Teknik dan Alat Pengumpulan Data .....	50
G. Validitas dan Reliabilitas .....	51
H. Teknik Analisis Data .....	55

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Temuan Umum.....	61
B. Profil Responden .....	65
C. Temuan Khusus.....	72
D. Pembahasan.....	97
E. Keterbatasan Penelitian .....	99

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>103</b>
----------------------------	------------

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Table 1 Rincian Anggaran Dana Desa .....	3
Tabel 2 Jumlah Perangkat Nagari .....	48
Tabel 3 Pengukuran Variabel .....	50
Tabel 4 Uji Validitas Variabel Beban Kerja .....	52
Tabel 5 Uji Validitas Variabel Pengelolaan Keuangan Nagari.....	53
Tabel 6 Uji Reliabilitas Variabel Beban Kerja .....	55
Tabel 7 Uji Reliabilitas Variabel Pengelolaan Keuangan Nagari .....	55
Tabel 8 Profil Responden Menurut Umur.....	66
Tabel 9 Profil Responden Menurut Jenis Kelamin .....	66
Tabel 10 Profil Responden Menurut Status Perkawinan .....	67
Tabel 11 Profil Responden Menurut Pendidikan Terakhir .....	68
Tabel 12 Profil Responden Menurut Jabatan .....	69
Tabel 13 Profil Responden Menurut Gaji .....	70
Tabel 14 Profil Responden Menurut Pendapatan Bersih .....	70
Tabel 15 Profil Responden Menurut Masa Kerja .....	71
Tabel 16 Deskripsi Variabel Beban Kerja .....	72
Tabel 17 Deskripsi Variabel Transparansi .....	73
Tabel 18 Deskripsi Variabel Akuntabilitas .....	74
Tabel 19 Deskripsi Variabel Partisipasi.....	75
Tabel 20 Deskripsi Variabel Tertib dan Disiplin Anggaran .....	76

Tabel 21 Deskripsi Variabel Pengelolaan Keuangan Nagari .....	78
Tabel 22 Hasil Kontribusi (R) Sub Variabel Tekanan Waktu terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari .....	79
Tabel 23 Hasil Uji Anova (F) Sub Variabel Tekanan Waktu terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari .....	80
Tabel 24 Hasil Uji T Sub Variabel Tekanan Waktu terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari .....	81
Tabel 25 Hasil Kontribusi (R) Sub Variabel Jam Kerja terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari.....	82
Tabel 26 Hasil Uji Anova (F) Sub Variabel Jam Kerja terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari .....	83
Tabel 27 Hasil Uji T Sub Variabel Jam Kerja terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari.....	83
Tabel 28 Hasil Kontribusi (R) Sub Variabel Kemenduaan Peran terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari.....	84
Tabel 29 Hasil Uji Anova (F) Sub Variabel Kemenduaan Peran terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari.....	84
Tabel 30 Hasil Uji T Sub Variabel Kemenduaan Peran terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari .....	83
Tabel 31 Hasil Kontribusi (R) Sub Variabel Banyaknya Informasi Masuk terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari.....	85
Tabel 32 Hasil Uji Anova (F) Sub Variabel Banyaknya Informasi Masuk terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari.....	86
Tabel 33 Hasil Uji T Sub Variabel Banyaknya Informasi Masuk terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari.....	86
Tabel 34 Hasil Kontribusi (R) Sub Variabel Tindakan Berulang terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari.....	87
Tabel 35 Hasil Uji Anova (F) Sub Variabel Temperatur terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari .....	88
Tabel 36 Hasil Uji T Sub Variabel Tindakan Berulang terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari .....	88
Tabel 37 Hasil Kontribusi (R) Sub Variabel Tanggungjawab terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari .....	89

Tabel 38 Hasil Uji Anova (F) Sub Variabel Tanggungjawab terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari .....	89
Tabel 39 Hasil Uji T Sub Variabel Tanggungjawab terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari .....	90
Tabel 40 Hasil Uji Multikoleniaritas Pengaruh Beban Kerja terhadap Kinerja Perangkat Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari .....	93
Tabel 41 Hasil Uji Autokorelasi Pengaruh Beban Kerja terhadap Kinerja Perangkat Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari .....	94
Tabel 42 Hasil Kontribusi (R) Pengaruh Variabel Beban Kerja terhadap Kinerja Perangkat Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari .....	95
Tabel 43 Hasil Uji Anova (F) Pengaruh Variabel Beban Kerja terhadap Kinerja Perangkat Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari .....	95

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Konseptual .....	41
Gambar 2 Struktur Organisasi Pemerintah Nagari.....	64
Gambar 3 Hasil Uji Normalitas Pengaruh Beban Kerja terhadap Kinerja Perangkat Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari .....	91
Gambar 4 Hasil Uji Linearitas Pengaruh Beban Kerja terhadap Kinerja Perangkat Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari .....	92
Gambar 5 Hasil Heteroskedastisitas Pengaruh Beban Kerja terhadap Kinerja Perangkat Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari .....	92
Gambar 6 Pengaruh dan Kontribusi Variabel X terhadap Y .....	97

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Otonomi daerah membawa suatu kesempatan yang besar bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan keuangan daerahnya dengan lebih baik. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, dan antara provinsi dan kabupaten/kota. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Tujuan pelaksanaan otonomi daerah ini menurut Mardiasmo (2002:46) adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Selain itu, tujuan pelimpahan wewenang dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi, sebagai penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Dengan adanya otonomi daerah ini, mengharuskan pemerintah daerah untuk mengelola sendiri keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang mana telah terjadi pelimpahan kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan

efektivitas penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sebagai upaya peningkatan kinerja ekonomi daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa desa atau desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang desa tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan semangat otonomi daerah hingga pada level Pemerintahan Desa (atau dengan nama lain telah diatur khusus/tersendiri). Dalam pasal 34 ayat 1, kewenangan desa berdasarkan hak asal usul terdiri atas; sistem organisasi masyarakat adat, pembinaan kelembagaan masyarakat, pembinaan lembaga dan hukum adat, pengelolaan tanah, kas desa serta pengembangan peran masyarakat desa. Dalam

hal ini desa diberikan kewenangan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan kewenangan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, desa mempunyai hak untuk memperoleh bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten. Perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten dimaksud selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa (ADD) yang penyalurannya melalui kas desa/rekening desa. Melalui ADD ini pemerintah daerah berupaya membangkitkan lagi nilai-nilai kemandirian masyarakat desa dengan membangun kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk mengelola dan membangun desa masing-masing. Penggunaan ADD ini dibagi dua, dengan rincian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1. Rincian Penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD)**

No	Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa sebesar 30%	Pemberdayaan masyarakat sebesar 70%
1.	Operasional Pemerintah Desa sebesar 50% dari belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah desa yang digunakan untuk : a. Belanja barang dan jasa/pengadaan barang, belanja pemeliharaan sarana Pemerintah Desa, belanja perjalanan dinas kepala desa dan perangkat desa sebesar 40% dari Operasional Pemerintah Desa. b. Belanja pegawai sebesar 60% dari Operasional Peemrintah desa untuk honor tim pelaksana desa.	Belanja modal (publik) sebesar 70% dari belanja pemberdayaan masyarakat dengan rincian sebagai berikut : a. Biaya perbaikan prasarana dan sarana publik. b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa. c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan. d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman. e. Teknologi tepat guna. f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan. g. Pengembangan sosial budaya. h. Kegiatan lainnya yang dianggap penting.
2.	Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebesar 25% dari belanja aparatur	Penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan sebesar 30% dari

	<p>dan operasional pemerintah desa yang digunakan untuk :</p> <p>a. Belanja barang dan jasa sebesar 40% dari total operasional BPD yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang, belanja pemeliharaan sarana sekretariat BPD, belanja perjalanan dinas ketua dan anggota BPD.</p> <p>b. Belanja pegawai sebesar 60% dari operasional BPD yang digunakan untuk tunjangan pimpinan dan anggota BPD.</p>	<p>belanja pemberdayaan masyarakat yang digunakan untuk belanja barang dan jasa, belanja pegawai yang meliputi:</p> <p>a. Penunjang kegiatan PKK.</p> <p>b. Penunjang kegiatan LPMD.</p> <p>c. Penunjang kegiatan RT/RW</p> <p>d. Penunjang kegiatan karang taruna</p> <p>e. Penunjang kegiatan hansip</p>
3.	Tunjangan kesejahteraan aparatur pemerintah desa sebesar 25% dari belanja aparatur dan operasional pemerintah desa	

*Sumber : Tembandjobu (2016)*

Selanjutnya menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada ketentuan umum Pasal 1 Ayat 6, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Di Sumatera Barat, Pemerintahan Nagari diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota masing-masing yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Barat, dan kemudian dikuatkan kembali dengan Peraturan Bupati untuk mengatur penyelenggaraannya. Pemerintahan nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Nagari dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah

Nagari adalah Kapalo atau nama lainnya dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari. Peraturan ini memuat tentang bagaimana pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar. Peraturan ini juga mengatur tentang asas pengelolaan keuangan nagari yaitu transparan, akuntabel, partisipatif dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Di Kabupaten Tanah Datar masih ditemukan permasalahan yang terkait dengan pengelolaan keuangan nagari, diantaranya adalah terdapat 3 nagari dari 75 nagari di Kabupaten Tanah Datar yang tidak dapat mencairkan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahap I. Sehingga mengakibatkan 72 nagari lainnya terkendala dalam pencairan ADD tahap II yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (RedaksiSumbar.com, diakses pada tanggal 20 Mei 2018). Selain itu juga berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat nagari pada tanggal 30 Mei 2018, ditemukan bahwa adanya keterlambatan dalam penyusunan APBNagari, sehingga perangkat nagari sering lembur pada akhir tahun yang mengakibatkan bertambahnya beban kerja.

Masalah lainnya yaitu kasus penggelapan dana nagari yang dilakukan oleh Walinagari Sungayang. Dana nagari ini diberikan oleh Provinsi Sumatera Barat sebagai hadiah karena nagari Sungayang dinobatkan sebagai juara 1 nagari berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat. Dana tersebut digunakan oleh 5

orang perangkat nagari dan 1 orang ketua LPM Nagari untuk berlibur ke Jakarta. Dan juga belum terealisasinya dana dari anggota DPRD yang berjumlah RP.10 Juta pada tahun 2013 dan RP.80 Juta pada tahun 2014 serta belum adanya peraturan nagari untuk Tim Pemeliharaan Program PNPM (TP3). Selain itu tidak adanya transparansi aset nagari, Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN) serta reward yang diberikan oleh Provinsi Sumatera Barat kepada masyarakat. (Wartaandalas.com, diakses pada tanggal 20 Mei 2018)

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan Walinagari Padang Magek pada tanggal 30 Mei 2018, karena terlambatnya pencairan anggaran setiap tahun sehingga dalam merealisasikan data tersebut jadi sangat terburu-buru karena waktu yang telah ditentukan, belum lagi dalam penyelesaian surat pertanggungjawaban dan lainnya, dan juga adanya perangkat nagari dan staff yang tidak bisa menggunakan laptop atau komputer, sehingga mereka membutuhkan bimbingan dan pelatihan dalam penggunaan teknologi seperti laptop atau komputer. Selain itu walinagari juga menjelaskan bahwa di nagari Simawang terdapat kemenduaan peran yang merupakan salah satu indikator dari beban kerja, yaitu Kepala Urusan juga merangkap sebagai Kepala Jorong, sehingga ia juga melakukan pekerjaan lain selain pekerjaannya di kantor walinagari. Selanjutnya walinagari juga menjelaskan bahwa biasanya pada akhir tahun perangkat nagari yaitu Bendahara, Sekretaris serta Kaur Keuangan sering lembur untuk membuat laporan keuangan. Tidak berbeda dengan Nagari Padang Magek, hal senada juga disampaikan oleh Walinagari Belimbing, bahwasannya pada akhir tahun aparat nagari juga sering lembur karena ada beberapa pekerjaan yang menumpuk,

biasanya pada bagian perlengkapan. Selain itu terlambatnya penyusunan APB Nagari, karena laporan tentang APB Nagari harus disampaikan pada bulan Januari, sedangkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan APBNagari sampai di Walinagari pada bulan Maret.

Selanjutnya berdasarkan hasil temuan di lapangan tepatnya di Kantor Wali Nagari Pangian pada tanggal 28 September 2019, terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi beban kerja perangkat nagari diantaranya yaitu; sering lembur, serta banyaknya informasi yang masuk yang harus dikelola dalam pekerjaan mereka. Selain itu Bendahara Nagari Koto Baru juga menyampaikan bahwa dengan banyaknya dana desa yang diberikan maka hal tersebut menyebabkan besarnya beban kerja dan tanggung jawab yang diterimanya.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang penulis temukan bahwa terdapat hasil penelitian yang menyatakan bahwa beban kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja perawat Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru yang dilakukan oleh Friska Aprilia (2017) dengan judul Pengaruh Beban Kerja, Stress Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Perawat Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru. Selain itu penelitian Widyastuti (2015), yang meneliti tentang Pengaruh Stres Kerja dan Beban Kerja Terhadap Kinerja SKPD Kabupaten Sintang Kalimantan Barat. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa beban kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Jadi beban kerja sangat mempengaruhi kinerja pegawai.

Namun ada juga hasil penelitian yang menyatakan bahwa beban kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja, seperti hasil penelitian dari

Iskandar (2017) dengan judul penelitian Pengaruh Karakteristik Individu, Beban Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Karyawan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa beban kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu, penelitian Riny Chandra dan Dody Adriansyah (2017) dengan judul penelitian Pengaruh Beban Kerja dan Stress Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Mega Auto Central Finance Cabang di Langsa. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa beban kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja.

Menurut Gibson (dalam Chandra, 2017:671) beban kerja adalah keharusan mengerjakan terlalu banyak tugas atau penyediaan waktu yang tidak cukup untuk menyelesaikan tugas. Selain itu, menurut Permendagri Nomor 12 tahun 2008, beban kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi beban kerja menurut Gibson (dalam Chandra, 2017:671) adalah; tekanan waktu, jam kerja, kemenduaan peran, banyaknya informasi masuk, tindakan berulang serta tanggung jawab.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa masih terdapat dua hasil penelitian yang berbeda dengan variabel yang sama, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Tanah Datar dengan judul **“Pengaruh Beban Kerja Terhadap Kinerja Perangkat Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Tanah Datar”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Terdapat beberapa nagari di Kabupaten Tanah Datar yang tidak dapat mencairkan Anggaran Dana Desa (ADD).
2. Tidak adanya transparansi dalam pengelolaan aset nagari pada beberapa nagari di Kabupaten Tanah Datar
3. Tidak adanya kejelasan dana DAUN (Dana Alokasi Umum Nagari) yang diterima oleh nagari.
4. Adanya kasus Wali Nagari yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi di beberapa nagari di Kabupaten Tanah Datar.
5. Kurangnya pengetahuan perangkat nagari dalam penggunaan perangkat-perangkat seperti komputer dan laptop.
6. Adanya perangkat nagari yang melakukan pekerjaan lain selain pekerjaannya di kantor walinagari.
7. Perangkat nagari sering lembur pada akhir tahun karena ada beberapa pekerjaan yang menumpuk serta membuat laporan keuangan, sehingga hal itu menyebabkan bertambahnya beban kerja perangkat nagari.

## **C. Batasan Masalah**

Mengingat cukup luasnya permasalahan di atas dan juga karena keterbatasan tenaga, dana serta waktu saat penelitian, maka penelitian ini tidak mengungkap seluruh aspek yang telah dijabarkan tadi. Adapun batasan masalah yang diteliti

adalah pengaruh beban kerja terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalahnya, yaitu “Apakah Terdapat Pengaruh Beban Kerja Terhadap Kinerja Perangkat Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Tanah Datar”. Secara lebih rinci rumusan masalah ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh tekanan waktu terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar.
2. Apakah terdapat pengaruh jadwal kerja terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar.
3. Apakah terdapat pengaruh kemenduaan peran dan konflik kerja terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar.
4. Apakah terdapat pengaruh banyaknya informasi yang masuk terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar.
5. Apakah terdapat pengaruh tindakan berulang terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar.
6. Apakah terdapat pengaruh tanggungjawab terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar.
7. Apakah Terdapat Pengaruh Beban Kerja Terhadap Kinerja Perangkat Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Tanah Datar

## **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh tekanan waktu terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui pengaruh jadwal kerja terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar.
3. Untuk mengetahui pengaruh kemenduaan peran dan konflik kerja terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar.
4. Untuk mengetahui pengaruh banyaknya informasi yang masuk terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar.
5. Untuk mengetahui pengaruh tindakan berulang terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar.
6. Untuk mengetahui pengaruh tanggungjawab terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar.
7. Untuk mengetahui pengaruh beban kerja terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar

## **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan konsep ilmu pengetahuan yang terkait dengan Administrasi Publik tentang Manajemen Sumber Daya Manusia dan Administrasi Keuangan Publik.

2. Secara praktis, manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi perangkat nagari, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan nagari.
- b. Bagi wali nagari, penelitian ini dapat menambah pengetahuan terkait dengan beban kerja sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam mengelola keuangan nagari. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam memperbaiki beban kerja demi meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan nagari.